

**RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN
2025**

**DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA ,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BALANGAN**



**RENCANA KERJA
(RENJA)TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Awt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025. Renja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian merupakan bagian dari tahapan upaya pencapaian rencana kerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian yang dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, dan dengan tersusunnya Renja ini diharapkan akan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian memudahkan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD.

Demikian Rencana Kerja ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA TA. 2025.

Kepala Dinas



MUHAMMAD NOR, S.Sos.MM
NIP. 197108231993031005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB II. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dan Sinergitas Kebijakan Daerah	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	58
3.3. Program dan Kegiatan.....	62
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Tahun 2025	71
BAB V. PENUTUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 disusun mengacu pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2025. Perumusan program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian tahun 2024 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2023 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Prov. Kalsel;

10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian

Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan
- 3) Penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Tahun 2024

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sesuai dengan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika 2021 – 2026.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISKOMINFOSAN TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2023

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan

peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah program yang dilaksanakan oleh Diskominfo, pada tahun 2022 ada 5 program, tetap menjadi 5 program di tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah kegiatan tidak mengalami pengurangan, pada tahun 2022 ada 12 kegiatan 26 sub kegiatan, sedangkan di tahun 2023 berkurang menjadi 11 kegiatan, dan 27 sub kegiatan.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja pada tahun 2023 sangat baik, yaitu sebesar Rp. 23.698.362.187 atau sebesar 91,38% dari total anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 25.932.795.061

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program Kegiatan Dinas
Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kab. Balangan Berdasarkan
Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023

NO	PROG/KEG/SUBKEG		PAGU ANGGARAN	REALISASI		
				KEUANGAN	%	FISIK
1	2		3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.555.896.409	7.427.578.110,00	86,81	100
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.568.500	62.568.500	97,49	100
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.728.500	54.728.500	99,99	100
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	7.840.000	7.840.000	82,97	100
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.286.104,362	4.286.104,362	80.13	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	4.286.104,362	4.286.104,362	80.13	100
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	335.600.000	335.600.000	99.22	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.800.000	66.800.000	97.90	100
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	268.800.000	268.800.000	99.56	100
	4	Kegiatan Administrasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.772.973.391	1.772.973.391	98.60	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.279.000	13.279.000	100.00	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	171.769.700	171.769.700	87.35	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.898.400	20.898.400	99.85	100

		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	18.660.000	18.660.000	99.68	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1.548.365.391	1.548.365.391	99.98	100
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306,487,831	306,487,831	91.63	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.603.500	67.603.500	99.57	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	58.246.907	58.246.907	87.07	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.537.233	270.537.233	94.76	100
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	573.944.217	573.944.217	97.98	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	263.603.139	263.603.139	97.36	100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.341.078	310.341.078	98.52	100
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		10.776.501.700	10.618.840.046	98.54	100
8.	8	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.618.840.046	10.618.840.046	98.54	100
		Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	508.331.100	508.331.100	93.76	100
		Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	160.400.000	160.400.000	90.71	100
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	209.333.500	209.333.500	97.06	100
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	114.255.590	114.255.590	98.46	100
		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	9.276.876.802	9.276.876.802	99.39	100
		Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	96.989.800	96.989.800	79.41	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	252.653.254	252.653.254	93.59	100
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		6.336.406.152	5.398.861.531	85.20	100

	9	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	805.366.910	805.366.910	86.36	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	805.366.910	805.366.910	86.36	100
	10	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.593.494.621	4.593.494.621	84.86	100
		Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	360.820.000	360.820.000	94.27	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4.232.674.621	4.232.674.621	84.15	100
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		231.856.000	223.987.800	96.61	100
	11	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	223.987.800	223.987.800	96.61	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	190.144.000	190.144.000	99.87	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	33.843.800	33.843.800	81.62	100
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		32.134.800	29.094.700	90.54	100
	12	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.094.700	29.094.700	90.54	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	29.094.700	29.094.700	90.54	100

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten BalanganTahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

LAMPIRAN XV

: PERATURAN BUPATI

BALANGAN NOMOR :

13 Tahun 2015

TANGGAL

:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2025

Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkatan realisasi (%)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Urusan.....				6	7	8=7/6		10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Bidang urusan sekretariat									
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96.25	90.80	90.80	90.80	1.00	93.50	93.50	0.97
2	16	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Lengkap, Valid dan Reliabel	100	100	100	100	1	100	100.00	1.00

2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	6	1	6	18	3.00
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	1	2	6	3.00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100	100	100	100	1	100	100	1.00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100	100	100	100	1	100	100	1.00
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2	2	2	1	1	5	5.00
2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52	54	54	54	1	15	123	2.37
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100	100	100	100	1	100	100	1.00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3.00
2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	1	1	1	10	12	6.00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	3	3.00
2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	3	3	3	1	3	9	3.00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik	100	100	100	100	1	100	100	1.00

2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100	100	100	100	1	100	300	3.00
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	0	0	0	-	2	2	1.00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31	30	30	30	1	31	91	2.94
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	2	2	1	2	6	#DIV/0!
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	80	40	40	40	1	60	140	1.75
						Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarkan Informasi Publik	100	100	100	100	1	100	300	3.00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarkan Informasi secara Berkala	100	100	100	100	1	100	300	3.00
						Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	10,000	9500	9500	9500	1	9750	28750	2.88
						Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100	100	100	100	1	100	300	3.00

2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	61	57	57	57	1	59	173	2.84
2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	12	12	12	1	12	36	3.00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	93	73	73	73	1	83	83	0.89
						Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87	53	53	53	1	67	67	0.77
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	87	53	53	53	1	67	67	0.77
2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	26	16	16	16	1	20	20	0.77
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	93	73	73	73	1	83	83	0.89

2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	1	1	1	1	1	1	1.00
2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1.00
					Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan		100	100	100	100	1	100	100	1.00
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Terakses	100	100	100	100	1	100	100	1.00
					Persentase Data Sektoral yang Valid		100	100	100	100	1	100	100	1.00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	100	100	100	100	1	100	100	1.00
					Jumlah Panduan Penggunaan Data Sektoral		3	NA	NA	NA	#VALUE!	3	3	1.00
					Jumlah Rancangan Metadata		10	NA	NA	NA	#VALUE!	10	10	1.00
					Jumlah data yang memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI)		1	NA	NA	NA	#VALUE!	1	1	1.00
2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3	3	3	3	1	3	3	1.00
2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	10	10	10	10	1	10	30	3.00
					Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		400	200	200	200	1	300	300	0.75
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Gangguan yang terselesaikan	100	100	100	100	1	100	300	3.00
					Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman		100	100	100	100	1	100	300	3.00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terpulihkan dan Terback-Up secara Berkala	100	100	100	100	1	100	300	3.00
					Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya		100	100	100	100	1	100	300	3.00
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12	12	12	12	1	12	36	3.00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja Dinas komunikasi,informatika,statistik dan persandian Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke I Kepala Daerah yakni *Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2016 - 2021, menurut indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi

oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Bagian Komunikasi dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi dan Kegiatan Penatalaksanaan Statistik dan Persandian Tahun 2016-2021.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian adalah Meningkatnya Penerapan E-Government ,Meningkatnya Cakupan desa yang terlayani TIK dan Meningkatnya Layanan data dan Informasi Pemerintahan secara online. Dengan indikator kinerja yaitu Presentase penerapan E-Government pada Instansi Pemerintah, Persentase desa yang terlayani TIK dan Presentase peningkatan jumlah pengunjung perbulan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Berlandaskan Visi Misi Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera"

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, dicanangkanlah 4 Misi Pembangunan Kabupaten Balangan. Dari 4 misi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian Misi Kesatu yaitu *meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan dan perkotaan*.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan tujuan Terwujudnya

Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas dengan indikator tujuan Indeks SPBE.

Adapun sasaran strategis Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan renstra adalah Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government. Dengan indikator kinerja yaitu Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK dan Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government. Dengan strategi Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas , maka pokok-pokok kebijakan program yang ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2023 adalah meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur dan jaringan pendukung e-government
 2. Mengintegrasikan semua layanan online SKPD dalam satu wadah yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan layanan.
 3. Peningkatan Layanan Informasi Publik.
 4. Peningkatan data statistik sektoral yang disajikan secara akurat.
 5. Peningkatan pengelolaan keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif
- Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, statistic dan Persandian adalah sebagai berikut :
- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 3 Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
 - 4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sangat berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 5 (Lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata – rata $\geq 100\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU
--------------------------	--

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU	N/A	100 %	100 %	100%	N/A

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dengan indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan yang berlaku, targetnya 100% ditahun 2023 ini, realisasinya 100%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%. Pencapaian dari target ini dpengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kesigapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut
2. Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti aplikasi PPID
3. adanya website <http://kim.balangankab.go.id/>.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

1. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku

Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku diperoleh dari Jumlah SKPD yang melaksanakan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan SP4n Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Adapun perhitungannya adalah dari Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku dibagi Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan dikalikan 100%.

Formula Perhitungan:	
	Jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku / Jumlah Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Balangan X 100%
	$\frac{30}{30} \times 100\% = 100\%$

Dari hasil pencapaian strategis diatas untuk indikator sasaran ini sudah dikatakan berhasil karena realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang diharapkan.

Rumus Perhitungannya:

Sehingga didapat: $(30/30) \times 100\% = 100\%$

Pencapaian sasaran ini didukung program dan kegiatan :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu didukung oleh kesiapan para operator atau admin dan pemberi kebijakan dalam memberikan laporan tindak lanjut.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu :

- ✓ adanya paradigma bahwa semakin banyak laporan yang ada maka akan mengindikasikan buruknya pelayanan di instansi tersebut.
- ✓ terbatasnya anggaran sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan.
- ✓ seringnya mutasi pegawai di lingkungan pemda tanpa diikuti dengan proses *transfer knowledge*.
- ✓ belum maksimalnya penggunaan aplikasi SP4N LAPOR! ini dikarenakan aplikasi ini masih belum dianggap penting dan strategis oleh masyarakat. Kedepan agar semua aduan dan aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan baik akan dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada penyelenggara layanan, juga meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan para operator atau admin dan pemberi kebijakan di masing-masing perangkat daerah.

2. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu :

- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana informasi seperti aplikasi PPID

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu :

- ✓ Eksistensi para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di Kabupaten Balangan secara umum masih mengalami berbagai kendala bahkan terkesan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
- ✓ masih banyak badan publik yang belum melakukan layanan informasi kepada publik dan terkesan malah masih menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan publik.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam hal ini PPID Utama harus koordinasi membuat daftar informasi publik, PPID pembantu serta melakukan uji konsekuensi dan pembenahan PPID perangkat daerah.

3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Adapun faktor pendukung terlaksananya program dan kegiatan serta sub kegiatan ini yaitu adanya website <http://kim.balangkab.go.id/>.

Sedangkan faktor Hambatan/Kendala yaitu Kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa, disebabkan karena perangkat desa yang belum mengetahui fungsi serta manfaat dari program KIM.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu penguatan, pemberdayaan KIM sebagai mitra diseminasi informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, dan Mengevaluasi struktur KIM agar bisa menjadi aktif.

SASARAN STRATEGIS		MENINGKATNYA AKSES LAYANAN TIK DAN E-GOVERNMENT			
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	

PERSENTASE DESA/WILAYAH YANG TERLAYANI TIK	N/A	99%	95,54%	96,50 %	N/A
---	-----	-----	--------	---------	-----

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatnya akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase desa/wilayah yang terlayani TIK, targetnya 99% ditahun 2023 ini, realisasinya 95,54%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 96,50%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah untuk tetap melaksanakan anggaran Pembangunan Jaringan Koneksi Internet di Desa Blank Spot karena merupakan salah satu indikator Visi Kepala Daerah dalam suksesnya Pembangunan Desa di Kabupaten Balangan.
2. Anggaran yang teralokasikan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan jaringan koneksi internet.
3. Tersedianya SDM yang berkualitas yang mempunyai kapasitas dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan dibantu oleh para Tenaga Ahli IT yang direkrut Dinas Komunikasi dan Informatika

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

Perbandingan Realisasi desa / wilayah yang terlayani TIK dari tahun 2018 s/d Th 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Persentase Desa / wilayah yang terlayani TIK	0%	24%	44%	84%	94.27%	95,54

SASARAN STRATEGIS		MENINGKATNYA PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA INSTANSI PEMERINTAH			
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN E-GOVERNMENT	N/A	53%	56,66%	105%	N/A

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatkan akses layanan TIK dan e-Government dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan e-Government, targetnya 53% ditahun 2023 ini, realisasinya 56,66%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 105%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesadaran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik yaitu diterapkan beberapa aplikasi yang diterapkan di SKPD kabupaten balangan dari 30 SKPD yang menerapkan sampai dengan tahun 2023 ada 17 SKPD yang menerapkan E-Government.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

SASARAN STRATEGIS		MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA SEKTORAL			
INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
PRESENTASE DATA SEKTORAL YANG	N/A	100%	90%	90%	NA

TERMANFAATKAN					
---------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatnya pemanfaatan data sektoral dengan indikator Persentase data sektoral yang termanfaatkan, targetnya 100% ditahun 2023 ini, realisasinya 90%, sehingga capaian dari indikator ini adalah 90%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh faktor antara lain adanya koordinasi dengan Badan Pusat Statistik tentang data sektoral yang diperlukan dan dilakukan survey kemudian diolah Bersama dengan Tim dari BPS Kab. Balangan untuk akhirnya data tersebut bisa dipublikasikan dalam bentuk Buku Statistik Kabupaten Balangan. Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda.

SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI
-------------------	---------------------------------

INDIKATOR	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A	200	238	119 %	NA

Berdasarkan tabel di atas sasaran strategis Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI), targetnya 200 ditahun 2023 ini, realisasinya 238, sehingga capaian dari indikator ini adalah 119%. Pencapaian dari target ini dipengaruhi oleh faktor antara lain dengan memberikan pelatihan kepada pegawai yang menangani kasus serangan cyber agar nantinya bisa mengatasi permasalahan kasus cyber.

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023 karena indikator yang menjadi tolak ukurnya berbeda

Disamping itu, Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa menara.

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 118.704.665 Atau 197.84% dari pagu sebesar Rp. 60.000.000, Sedangkan pada tahun 2022 target yang dibebankan sebesar Rp.49.500.000

Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian masih berada pada *track* yang benar dan menunjukkan performa yang cukup baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti pengawasan retribusi menara serta kapasitas bandwidth yang masih belum maksimal.

Beberapa langkah penyelesaian permasalahan tersebut antara lain dengan Mengoptimalkan tugas serta fungsi bidang terkait khususnya dalam pengawasan serta aktif dalam pengawasan retribusi menara, meningkatkan kapasitas bandwidth agar sesuai dengan kebutuhan. Serta Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap setiap tahun terutama sarana dan prasarana yang mendukung untuk mengimbangi kemajuan teknologi informatika khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan tugas, pokok dan fungsi masing – masing seksi, Meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis maupun fungsional baik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan maupun lembaga teknis terkait setiap tahunnya serta Memberdayakan pegawai yang ada dengan pembekalan kepada petugas operasional / lapangan tentang pengawasan menara serta fungsinya.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Komunikasi, informatika, statistik dan persandian

NO	Indikator	SPM/sta n dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n- 2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n- 2)	Tahu n 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku			100	100	100	100	0	100	100	100	
2.	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK			94	99	100	100	0	96,50	100	100	
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government			53	53	67	87	0	105	67	87	
4.	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan			100	100	100	100	0	90	100	100	
5.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			184	200	300	400	0	119	300	400	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagai Lembaga Teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan

pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian. Dan Sesuai Perbup Kabupaten Balangan Nomor : 38 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Maka disusunlah Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian Tugas Pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur dengan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengadaan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur ini menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (*Media Center*) dan pengembangan Pusat Jaringan Informasi Pedesaan (PJIP), akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat

- c. Penerapan Balangan *Online* Informasi dan Teknologi, memberikan dampak terhadap perubahan pola perencanaan, penganggaran, pelayanan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan secara bertahap, sehingga memberikan dampak terhadap kemudahan, kecepatan, ketepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas :

- a. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
- b. Kelembagaan pengadaan barang / jasa secara elektronik
- c. Dinamika masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan prima.

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi Layanan E-government dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan :

1. Cakupan Internet
2. Pelayanan PPID
3. Pelayanan Informasi dan aduan Publik (SP4N LAPOR)
4. Layanan E-Government

Empat aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keempat aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Cakupan Internet

Cakupan internet ini merupakan indikator utama dalam RPJMD, namun sampai sekarang permasalahan cakupan internet ini masih belum terselesaikan.

Permasalahan inti pada cakupan internet ini antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi
- b. Anggaran dan waktu yang terbatas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur teknologi informasi ini.

2. Pelayanan PPID

Permasalahan inti pada Pelayanan PPID diantaranya adalah

- a. Belum tersedianya system Informasi PPID
- b. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yg memadai.

3. Layanan E-Government

Sampai dengan akhir tahun 2020 DISKOMINFO melakukan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun anggaran renstra, belum seluruh OPD terakses dalam website Pemkab. Adapun targetnya adalah bahwa aksesibilitas seluruh OPD bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

4. Pelayanan Informasi dan aduan Publik.

Permasalahannya belum adanya SOP Tentang penanganan dan layanan Aspirasi dan aduan Publik. Yang berdampak pada proses tindak lanjutnya.

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Kominfo terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Kominfo mendukung visi dan misi Kepala Daerah ke.1, yaitu *Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan*, Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tantangan

- a. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana;
- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Balangan khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- c. Belum kuatnya jejaring informasi antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- d. Pesatnya perkembangan TIK;
- e. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata di Kabupaten Balangan;
- f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat Kabupaten Balangan terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
- g. Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
- h. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
- i. Peningkatan kapasitas SDM.

Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.
- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan elektronik government pada Pemerintah Kabupaten Balangan.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten Balangan berbasis elektronik;
- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di Kabupaten Balangan;
- Kesadaran masyarakat Balangan akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi;
- Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Balangan;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan Kabupaten Balangan;
- Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat tepat,murah,dan sederhana.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan Dinas Komunikasi,informatika,statistik dan persandian Tahun 2024 adalah sebagai :

- Pembangunan menara pada sekolah,desa dan puskesmas
- Pemasangan CCTV pada titik rawan
- Peningkatan media informasi publik
- Pengoptimalan aplikasi satu data dan metadata statistik

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023, merupakan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2021 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan sebagai salah satu SOPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan ;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif;

Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 yang terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo adalah misi ke 1, Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Sasaran yang ingin dicapai untuk prioritas ini adalah meningkatnya kinerja pemerintah daerah dengan strategi peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja Pemerintah Daerah melalui peningkatan kualitas data dan informasi dan memantapkan sinkronisasi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Infrastruktur Jaringan internet ke Pedesaan, mengintegrasikan data skpd di kabupaten Balangan, Meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik untuk masyarakat kabupaten Balangan.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(8)	(4)	(10)	(11)	(12)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96,25	9,027,434,348	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	96,25	11.434.665.545	
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	72.112.500	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	78.091.700	

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	56,707,500.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	56,707,200.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	21.384.500.000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,637,832,998	Kegiatan Administrasi Keuangan	Balangan	Jumlah waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.926.467.661	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang bulan	6,637,832,998	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang bulan	6.926.467.661	

C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98.776.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balangan	Jumlah waktu penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	198.776.000	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 orang	75,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 orang	175,000,000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23,776,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Balangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23,776,000	
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1,076,649,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	1,676.843.200	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	18,000,600	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	17.990.800	

			Disediakan sisediakan					Disediakan sisediakan			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	368.968.300	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	25,605,400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	25,605,100	
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	18,720,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	18,720,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,002,323,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,245.550.000	

e	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	200,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.228.674.212	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioan atau Lapangan	Balangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioan atau Lapangan	Balangan	Jumlah unit kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	413.291.000	
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	815.383.212	
3	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	-	-	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang diadakan	-	-	
f	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	631,506,400	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	1.015.256.672	

1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70,300,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	210.700.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77,393,000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77,393,000	
3	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	483,813,400	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	727.163.672	
g	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	310.557.450	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah waktu pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	310.556.100	
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	31 Unit	310,557,450	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	31 Unit	310.556.100	

			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	-	
B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	-Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	80%	7,941,536,600	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Balangan	-Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	80%	9.234.797.700	
			Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarkan Informasi Publik	100%				Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarkan Informasi Publik	100%		
A	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	- Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarkan Informasi secara Berkala	100%	7,941,536,600	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	- Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarkan Informasi secara Berkala	100%	9.234.797.700	

			-Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	10.000 orang				-Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	10.000 orang		
			Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100%				Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100%		
1	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	168,665,100	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	192.970.000	
2	Penyusunan Konten	Kabupaten Balangan	Jumlah Konten Informasi Publik	48 Konten	327,870,000	Penyusunan Konten	Kabupaten Balangan	Jumlah Konten Informasi Publik	48 Konten	327,870,000	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	5 Media	263,880,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Balangan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan	5 Media	328.440.000	

			media berbayar sesuai kriteria/juknis					media berbayar sesuai kriteria/juknis			
4	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	126,650,000	Pelayanan informasi publik	Kabupaten Balangan	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	185.261.000	
5	Relasi Media	Kabupaten Balangan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	6,897,211,500	Relasi Media	Kabupaten Balangan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	8.022.216.700	
6	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Balangan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	157,260,000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Balangan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi kan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	153.950.000	

C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Balangan	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	93%	4.031.834.652	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Balangan	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	93%	6.970.834.852	
			Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87%				Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87%		
a	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	93%	4.031.834.652	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Balangan	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	93%	6.970.834.852	
1	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan	26 Perangkat Daerah	1,058,499,800	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan	26 Perangkat Daerah	1.589.080.000	

			Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			
2	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	391,500,000	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	337.850.000	
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	2,581,834,852	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Balangan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	5.034.904.852	

E	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kabupaten Balangan	Persentase Data Sektoral yang Teraksesmen yusun perencanaan pembanguna n daerah	100%	324.976.400	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Kabupate n Balangan	Persentase Data Sektoral yang Teraksesmen yusun perencanaan pembanguna n daerah	100%	714.606.900	
			Persentase Data Sektoral yang Valid	100%							
a	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	100%	324.976.400	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Balangan	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	100%	714.606.900	
			Jumlah Panduan Penggunaan Data Sektoral	3 Dokume n				Jumlah Panduan Penggunaan Data Sektoral	3 Dokume n		
			Jumlah Rancangan Metadata	10 Rancan gan				Jumlah Rancangan Metadata	10 Rancan gan		
			Jumlah data yang memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI)	1 Data				Jumlah data yang memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI)	1 Data		

1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	72,286,400	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	345.726.900	
2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persen	185,826,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Balangan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persen	228.111.500	
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Balangan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	66,864,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Balangan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	140.768.500	
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Persentase Gangguan yang terselesaikan	100%	74,218,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN INFORMASI	Kabupaten Balangan	Persentase Gangguan yang terselesaikan	100%	555.122.500	
			Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman	100%				Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman	100%		
a	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kabupaten Balangan	Persentase Data yang Terpulihkan dan Terback-Up secara	100%	74,218,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Kabupaten Balangan	Persentase Data yang Terpulihkan dan Terback-Up secara	100%	555.122.500	

			Berkala			Daerah		Berkala			
			Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya	100%				Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya	100%		
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	74,218,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	555.122.500	

2.1. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari aspirasi masyarakat melalui DPRD akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berkenaan dengan usulan program untuk tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL T-C.32

SKPD : DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	PAKET PEKERJAAN	SASARAN	PAGU	CATATAN
(1)	(2)			(8)
1	Langganan aplikasi panggilan darurat 112	Dinas kominfosan kab. Balangan	199.800.000	1 Tahun
2	- Langganan sewa hosting website	Dinas kominfosan kab. Balangan	65.000.000	1 Tahun
3	- Sewa akun appstore	Dinas kominfosan kab. Balangan	2.500.000	1 Tahun
4	- Sewa akun playstore	Dinas kominfosan kab. Balangan	1.000.000	1 Tahun
5	- Sewa Dedicated server	Dinas kominfosan kab. Balangan	108.000.000	1 Tahun

6	- Biaya kontribusi bimbingan teknis SPBE	Dinas kominfosan kab. Balangan	320.000.000	64 Orang/Kali
9	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Dinas kominfosan kab. Balangan	Rp 348.000.000	1 Tahun (Belanja Pembuatan Video, Iklan Dll)
10	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	Dinas kominfosan kab. Balangan	Rp 3.083.220.000	1 Tahun (belanja Majalah, Surat Kabar dll)
11	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	Dinas kominfosan kab. Balangan	Rp 150.000.000	1 Unit
12	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar alat studio lainnya	Dinas kominfosan kab. Balangan	Rp 2.392.800	1 Tahun
13	Bimbingan teknis pengelolaan data statistik persandian	Dinas kominfosan kab. Balangan	59.246.460	2 petugas x 30 OPD (paket meeting)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Isu strategis Kabupaten Balangan Tahun 2025 untuk Misi I adalah Pemenuhan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan Serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Strategi dalam menyikapi isu strategis di atas antara lain :

1. Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah
 2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang
 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan saluran pengairan dan irigasi
 4. Meningkatkan Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah
 5. Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah
 6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman
 7. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan
 8. Meningkatkan efektifitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan
 9. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
 10. Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup
- Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2025 yang berhubungan langsung dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Balangan yaitu pada Misi 1 Strategis 1 “ Pemenuhan Infrastruktur Perdesaan Dan Perkotaan Serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Strategis”

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Balangan.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2020-2024, RKP Nasional, Rensta Kementerian Kominfo 2020-2024; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2020–2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2023; dan RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Balangan 2023

Dinas Kominfo sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki peran di dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan infrastruktur. Untuk menyusun dan mengawal implementasi rencana pembangunan, pada tahun 2025 Dinas Kominfo merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 28.910.027.497,00.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo.

1. Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun arah kebijakan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan komunikasi dan informatika adalah :

- Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah
- peningkatan kualitas sarana pelayanan publik, peningkatan kualitas data dan informasi,
- mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah, dan
- peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik
- 2) Program Pengembangan dan pengelolaan komunikasi public
- 3) Program Pengembangan dan pengelolaan E-Government
- 4) Program Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan Persandian

Selengkapnya dapat dilihat di Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Mewujudkan konektivitas pita lebar nasional, mewujudkan pemerintah sebagai Government Publik Relation (GPR),	Renstra Kementerian Kominfo 2021-2026	
2	Mendukung revolusi mental	RPJMN 2021-2026	
3	Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
4	Efisiensi industri telekomunikasi	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
5	Mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
6	Mengintegrasikan nomor panggilan, penataan registrasi Prabayar	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
7	Mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
8	Meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
9	Mendorong pertumbuhan e-Commerce	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
10	Menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
11	Mengintegrasikan layanan e-Government	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
12	Mempercepat proses migrasi TV analog ke digital	Renstra Kementrian Kominfo 2021-2026	
B	Provinsi Kalimantan Selatan		

1	Peningkatan transparansi pelaksanaan pembangunan daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
2	Peningkatan kualitas sarana pelayanan public	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
3	Peningkatan kualitas data dan informasi	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	
4	Mendorong pengembangan kualitas Sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah	RPJMD Prov Kalsel Tahun 2021-2026	

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang kominfo di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang kominfo antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien. Kementrian Komunikasi dan informatika menetapkan lima program prioritas yakni program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta program pengelolaan spektrum frekuensi. Lalu program standar perangkat dan layanan publik, kemudian program pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, program komunikasi publik dan program dukungan manajemen. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal), begitu juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan maupun dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Balangan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas kominfo Kabupaten Balangan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan **Standar Pelayanan Minimal**.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial (psl 12).

Maka dalam implementasinya di Daerah karena **Urusan Kominfo** masuk dalam **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, sehingga Dinas Kominfo Kabupaten Balangan tidak diwajibkan menyusun laporan SPM sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN BIDANG KOMINFO.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan adalah “KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA”

Sedangkan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana
- Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan **pada bidang Kominfo** termasuk pada misi ketiga yaitu “**Meningkatnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian berbasis kewilayahan**”, dilaksanakan melalui prioritas Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dengan tujuan Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang merata, dan berkualitas, serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya:

Untuk prioritas daerah dengan memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian.

Program Prioritas Pembangunan bidang Kominfo akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Aplikasi informatika
- 2) Program informasi dan Komunikasi

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN
1	Terwujudnya Infrastruktur Teknologi Informasi yang Berkualitas	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%
		Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	100%
			Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government	87%
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral	Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	100%
		Meningkatnya Keamanan dan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	400

Sedangkan Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2025 ini antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisa mendukung semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan sistem komunikasi dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
- Mewujudkan layanan akses komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien;
- Penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas;

- f. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik.
- g. Mewujudkan daya guna informasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan focus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatkan kesediaan data dan informasi yang akurat, reliabel, dan lengkap;
- d. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika;
- e. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan sistem layanan pemerintahan melalui teknologi informasi (e-government) yang terintegrasi Kabupaten Balangan;
- f. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi.
- g. Tersedianya informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akurat, cepat dan tepat.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas
Komunikasi,informatika,statistik dan
persandian

Indikator	NO	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(2)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	2	87%	92%	94%	99%	100%	100%	100%	100%
Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government	3	15%	37%	53%	53%	67%	87%	100%	100%
Persentase Data Sektoral yang Termanfaatkan	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	5	NA	NA	184	200	300	400	500	500

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program tersebut, ada beberapa kriteria yang ditetapkan antara lain:

1. Memperhatikan tugas pokok dari masing-masing bidang
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah serta pencapaian IKU Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk Tahun 2025 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kominfo merencanakan akan melaksanakan 5 (lima) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 28.910.027.497

3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
 - Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3.3.2 Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan komunitas Informasi Masyarakat

- Pelayanan Informasi Publik
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Penyusunan Konten

3.3.3 Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

3.3.4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan meliputi

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

1.3.5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan meliputi :

- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2025 Kabupaten Balangan untuk sumber dana APBD Kabupaten secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi/Kabupaten/Kota
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	8	9	10	11	15	16
						DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		28.910.027.497,00					30.800.186.309,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		28.910.027.497,00					30.800.186.309,00
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		27.640.298.097,00					30.076.040.940,00
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	96.25 %	11.434.665.545,00			-	10.679.596.969,00
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang lengkap, Valid dan Reliabel	100 %	78.091.700,00			-	127.582.346,00
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	56.707.200,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		110.863.163,00
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	21.384.500,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		16.719.183,00	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib dan akuntabel	100 %	6.926.467.661,00			-	7.000.000.000,00
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	6.926.467.661,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.000.000.000,00
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	100 %	198.776.000,00			-	406.395.000,00
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.776.000,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		31.395.000,00
	2	16	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52 Orang	175.000.000,00	Kab. Balangan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-		375.000.000,00

[illegible]

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.245.559.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1.456.733.750,00	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.228.674.212,00			-	629.982.300,00
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	413.291.000,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		450.000.000,00	
	2	16	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	815.383.212,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		179.982.300,00	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik	100 %	1.015.256.672,00			-	419.234.800,00
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	210.700.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		70.357.000,00	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	77.393.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA		89.010.000,00	

										Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	727.163.672,00	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		259.867.800,00
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100 % 12 Bulan	310.556.100,00			-	337.993.913,00
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	310.556.100,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		337.993.913,00
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarkan Informasi Publik	90	9.234.797.700,00			-	12.981.329.456,00

	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala -Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik- Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	100	9.234.797.700,00			-	12.981.329.456,00
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media							
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	8.022.216.700,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL		11.821.465.250,00
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	153.950.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL		307.443.300,00
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	185.261.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL		211.628.750,00
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	192.970.000,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL		135.775.406,00

							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	228.111.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		309.497.614,00
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia							
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	10 Dokumen	140.768.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		168.371.500,00
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			555.122.500,00				110.821.360,00
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentasi Gangguan Yang Terselesaikan-Persentasi Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Yang Aman	100 %	555.122.500,00			-	110.821.360,00
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Data Yang Terpilihkan dan Terback-Up secara Berkala-Persentasi Perangkat Lunak Yang Terjamin Keamanannya	100 %	555.122.500,00			-	110.821.360,00
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	555.122.500,00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		110.821.360,00
	J U M L A H								28.910.027.497,00				30.800.186.309,00

ROGRAM KEGIATAN PRIORITAS PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
Meningkatnya Akses Layanan TIK dan e-Government	Persentase Desa/Wilayah yang Terlayani TIK	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	93%	6.970.834.852
	Persentase Perangkat Daerah dengan Layanan e-Government		Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87%	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	93%	6.970.834.852
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	26 Unit	1.589.080.000
		Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah	1 Dokumen	337.850.000

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
			yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	5.034.904.852
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan yang Berlaku	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	80%	9.234.797.700
			Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik	100%	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala	100%	9.234.797.700
			Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	10.000 orang	
			Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan	100%	

Sasaran	Indikator	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran
		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	192.970.000
		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	48 Konten	351.960.000
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	328.440.000
		Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	185.261.000
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	8.022.216.700
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	12 Komunitas	152.950.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021- 2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan pada tahun 2025 mempunyai 5 Program, 11 Kegiatan, 29 sub kegiatan.

Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 2 program sedangkan 3 program sebagai pendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sedangkan program yang mendukung capaian sasaran ada 2 yaitu:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan komunikasi publik

Tabel 4.1
Usulan Pendanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	SESUAI PAGU	Belanja Utama	
(2)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Bidang Urusan Sekretariat							KELEBIHAN/ KURANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Diskominfo	96,25%	11.434.665.54	11.434.665.54		0,00
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Diskominfo	100%	78.091.700	78.091.700		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	6 dokumen	56,707,200	56,707,200	Belanja TKHL administrasi penyusunan dokumen perencanaan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Diskominfo	2 Laporan	21.384.500	21.384.500	Belanja Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Perencanaan	

	Kinerja SKPD						
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	100%	6.926.467.661	6,637,832,998	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	12 orang bulan	6.926.467.661	6,637,832,998	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Diskominfo	100%	198.776.000	98.776.000	Belanja pakaian dinas dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	1 Paket	23,776,000	23,776,000	Belanja Pakaian Dinas	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	52 orang	175,000,000	175,000,000	Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	12 bulan	1,676.843.200	1,676.843.200	Belanja komponen listrik, belanja barang cetakan dan penggandaan, belanja bahan bacaan peraturan perundang-undangan, belanja perjalanan dinas	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	17.990.800	17.990.800	Belanja komponen listrik	

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	2 Paket	368.968.300	368.968.300	Belanja printer, bendera dan umbul-umbul	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Diskominfo	1 Paket	25,605,100	25,605,100	Belanja Cetak	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	3 Dokumen	18,720,000	18,720,000	Belanja Bahan Bacaan/Buku, Belanja Surat Kabar/Majalah	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	12 Laporan	1,245.550.000	1,245.550.000	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan	Diskominfo	12 bulan	1.228.674.212	1.228.674.212	Belanja Pembangunan 1 Buah Gedung Kantor Baru	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Diskominfo	1 Unit	413.291.000	413.291.000	Belanja Pembangunan Gedung Kantor Baru	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	1 Unit	815.383.212	815.383.212	Belanja Pembangunan Gedung Kantor Baru	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	1.015.256.672	1.015.256.672	Belanja TKHL administrasi umum, belanja langganan listrik, air dan telepon, belanja alat kebersihan, belanja TKHL kebersihan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	12 Laporan	210.700.000	210.700.000	Belanja TKHL administrasi umum	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	77,393,000	77,393,000	Belanja langganan listrik air dan telepon	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	727.163.672	727.163.672	Belanja TKHL tenaga kebersihan, Belanja service peralatan kantor, Belanja ATK, Belanja Makanan dan Minuman	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	12 bulan	310.556.100	310.556.100	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	31 Unit	310.556.100	310.556.100	Belanja service kendaraan bermotor, belanja tenaga sopir, suku cadang, pajak, BBM	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Balangan	80%	9.234.797.700	9.234.797.700	Belanja Kerjasama Media	0,00
	Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik		100%				
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala	Balangan	100%	9.234.797.700	9.234.797.700	Belanja Kerjasama Media	0,00
	- Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik		10.000 orang				
	Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan		100%				

Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Balangan	12 Rekomendasi	192.970.000	192.970.000	Belanja Makan Minum Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas	0,00
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Balangan	48 Konten	327,870,000	327,870,000	Belanja TKHL tenaga peliputan/media center	0,00
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Balangan	5 Media	328.440.000	328.440.000	Honorarium Penulis berita, belanja TKHL administrasi umum	0,00
Pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Balangan	12 Permohonan	185.261.000	185.261.000	PPID	0,00
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Balangan	1 Laporan	8.022.216.700	8.022.216.700	Belanja Langganan Surat Kabar/Kerjasama Media	0,00
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Balangan	12 Komunitas	153.950.000	153.950.000	Belanja makan minum sosialisasi, spanduk, ATK, penggandaan	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfo	Balangan	93%	6.970.834.852	6.970.834.852	Belanja Bandwith, Belanja Pemeliharaan Menara dan Belanja Pembangunan	0,00

	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		87%			Jaringan Koneksi Internet Desa	
Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan e-Government	Balangan	85%	6.970.834.852	6.970.834.852	Belanja Manajemen Bandwith, Belanja Pembangunan Jaringan Koneksi Internet Desa	
Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Balangan	1 Dokumen	337.850.000	337.850.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Balangan	1 Aplikasi	5.034.904.852	5.034.904.852	Belanja Manajemen Bandwith, Pembangunan Menara Internet Sekolah dan Belanja Command Center	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Balangan	26 Perangkat Daerah	1.589.080.000	1.589.080.000	Belanja Hosting Langganan 112	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Teraksesmenyusun perencanaan pembangunan daerah	Balangan	100%	714.606.900	714.606.900	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	

	Persentase Data Sektoral yang Valid		100%			Bimtek	
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	Balangan	100%	714.606.900	714.606.900	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Bimtek	
	Jumlah Panduan Penggunaan Data Sektoral		3 Dokumen				
	Jumlah Rancangan Metadata		10 Rancangan				
	Jumlah data yang memenuhi standar Satu Data Indonesia (SDI)		1 Data				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Balangan	10 Orang	345.726.900	345.726.900	Jumlah Pegawai yang diikuti sertakan Bimtek	
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Balangan	100 Persen	228.111.500	228.111.500		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		10 Dokumen	140.768.500	140.768.500		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Gangguan yang Terselesaikan	Balangan	100%	555.122.500	555.122.500	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
	Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman		100%				

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Data yang Terpulihkan dan Terback-Up secara Berkala	Balangan	100%	555.122.500	555.122.500	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
	Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya		100%				
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Balangan	12 Laporan	555.122.500	555.122.500	Belanja pemeliharaan jaringan internet, belanja bimbingan teknis	
			TOTAL RKA	28.910.027.497	28.910.027.497		0,00

4.2 Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan RENSTRA, Dinas Kominfo Kabupaten Balangan memiliki tujuan dan sasaran “ meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” “ dimana di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas Kominfo memilih dua Program yang dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Program tersebut adalah **“program Aplikasi Informatika dan program informasi dan komunikasi publik”**.

Program aplikasi informatika merupakan program yang mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan internet baik di desa maupun antar OPD. Peningkatan layanan internet berupa pengadaan bandwidth dan pembangunan menara pada desa blankspot , baik di desa, puskesmas dan juga sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan infrastruktur yang ada di desa dapat berjalan dengan pesat. Dengan menggunakan internet, pemerintah desa bisa dengan mudah menyebarkan informasi kepada seluruh warga desa, seperti berita penting, pengumuman warga, peringatan dini, regulasi baru, dan lainnya. Juga mempermudah komunikasi antar desa. Konektivitas internet yang stabil memungkinkan masyarakat pedesaan mengakses [website-website](#) yang menginformasikan rangkaian studi, analisa dan bimbingan teknik agrikultur dan agribisnis. Mereka bisa mengumpulkan, membandingkan, dan menyimpulkan informasi yang terbaik baginya. Mereka bisa berkonsultasi langsung dengan para ahli via website dan medsos. Mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi pertanian android seperti petani, mata daun, dan regopantes, yang membantu meningkatkan kualitas dan menjual produknya langsung ke konsumen secara *online*, dengan harga yang baik. Cara ini memotong permasalahan klasik [distribusi produk](#) pedesaan yang selama ini kerap merugikan masyarakat pedesaan. Pahalanya keuntungan lebih banyak dirasakan oleh tengkulak atau pedagang dibandingkan produsennya sendiri. Dengan tren pariwisata yang

juga meningkat, internet membantu mempromosikan daya tarik suatu wilayah yang selama ini tersembunyi. Sebagaimana yang dipahami, wisata menjadi jalan singkat untuk meraih kesejahteraan masyarakat dalam wilayah tersebut. Seharusnya masyarakat pedesaan bukan sekedar tahu apa itu internet, tapi membangun dan mengembangkan hidupnya dengan internet. program yang kedua adalah program informasi dan komunikasi publik(PIKP) adalah kegiatan yang bergerak pada layanan informasi kepada masyarakat. Adapun Tujuan penggunaan media dalam kegiatan Humas adalah :

1. Membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa;
2. Menjalin komunikasi berkesinambungan;
3. Meningkatkan kepercayaan public, baik internal maupun eksternal; dan
4. Meningkatkan citra baik perusahaan/ organisasi.

Dalam urusan bidang PIKP sendiri kegiatan terdiri dari :

- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik, kegiatan berupa website tentang layanan pengaduan masyarakat. Dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang masalah yang ada dimasyarakat.
- Penyusunan Konten, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, pelayanan informasi publik. kegiatan berupa pengelolaan media/ informasi melalui media elektronik
- Relasi Media, berupa pemberian informasi kepada masyarakat tentang hal tertentu melalui media baik elektronik maupun non elektronik.
- Pelayanan Informasi Publik, kegiatan berupa PPID yang beisikan data OPD yang mudah diakses
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat kegiatan berupa pembentukan kelompok informasi masyarakat yang di bentuk untuk memberikan informasi tentang penggunaan internet yang benar guna meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya rencana kerja ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur

Renja Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja 2025 ini diharapkan agar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan , adil dan akuntabel.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan



MUHAMMAD NOR, S.Sos., MM
NIP. 19710823 199303 1 005

